



**LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH DESA WONOSARI
KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iError! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	Error! Bookmark not defined.
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Error! Bookmark not defined.
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA....	Error! Bookmark not defined.
A. PROGRAM KERJA.....	4
B. REALISASI KEGIATAN.....	4
BAB III BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Error! Bookmark not defined.
A. PROGRAM KERJA.....	6
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA.....	6
BAB IV BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Error! Bookmark not defined.
A. PROGRAM KERJA.....	8
B. REALISASI KEGIATAN.....	8
BAB V BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Error! Bookmark not defined.
A. PROGRAM KERJA.....	9
B. REALISASI KEGIATAN.....	9
BAB VI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK DESA	10
A. PROGRAM KERJA.....	10
B. REALISASI KEGIATAN.....	10
BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	11
BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.....	12
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	12
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	12
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	13
BAB IX PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban, wewenang dan hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 36 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada BPD serta memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 Bab. II Pasal 4 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran diwajibkan memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Lewat Camat serta memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD serta memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 disusun untuk memberikan laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

VISI :

“Menuju Desa Wonosari yang bersatu, maju, cerdas, sejahtera, dan bertaqwa”

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang Efisien, Efektif dan Transparan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memetakan dan menitik beratkan pembangunan dengan skala prioritas.
3. Meningkatkan kesadaran akan adat istiadat, budaya dan menciptakan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan sumber potensi desa serta Sumber Daya Manusia yang berakhlakul karimah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Desa

1. Penguatan system perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan dengan keterlibatan dan pemberdayaan semua elemen masyarakat Desa Wonosari.
2. Strategi pembangunan yang diarahkan untuk membangun Desa Wonosari adalah pembagunan fisik materiil dan pembangunan spiritual jiwa manusia..

Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Selama pemerintahan antara tahun 2017 s/d 2022 Pemerintah Desa Wonosari sebagaimana tertuang dalam RPJMDes Wonosari, telah mengagendakan beberapa prioritas yang telah dicapai sebagaimana berikut;

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.

Sasaran yang akan dicapai :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta transparan.
- Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang cepat dan tepat sesuai prosedur.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penggunaan komputer dan teknologi informasi yang lain seperti pemanfaatan jaringan internet.

Arah kebijakannya adalah terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan desa yang cepat, tepat, akurat sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memetakan dan menitik beratkan pembangunan dengan skala prioritas.

Sasaran yang akan dicapai :

- Perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur terkecil di desa sehingga mempermudah bagi pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
- Membangun perilaku pembangunan dan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- Mewujudkan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bijak sesuai hasil musrenbangdes yang telah dicapai secara transparan.

Arah kebijakannya adalah terwujudnya proses perumusan perencanaan, pelaksanaan, serta kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang transparan.

3. Meningkatkan kesadaran akan adat istiadat, budaya dan menciptakan stabilitas keamanan.

Sasaran yang akan dicapai :

- Membina SDM yang ada dengan cara menggalakkan masuk pendidikan formal/ non formal dari usia dini.
- Meningkatkan ketahanan masyarakat akan gangguan ketentraman dan ketertiban Desa.
- Meningkatnya nilai-nilai sosial, budaya kemasyarakatan, dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok, dan antar dusun.

Arah kebijakannya adalah pemerintah Desa Wonosari bersama masyarakat bersatu padu untuk mewujudkan masyarakat mandiri serta menciptakan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan sumber potensi desa serta sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.

Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan optimalitas pemanfaatan potensi desa yang ada bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- Meningkatkan penggalian sumber-sumber potensi yang ada di desa yang belum tersentuh bagi pendapatan asli desa demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakannya adalah mengoptimalkan / memanfaatkan sekaligus mencari sumber pendapatan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2020 seperti yang tercantum dalam RPJMDes dan RKP Desa 2020 serta dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sejumlah Rp. 466.457.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Kepala Desa	Rp 54.000.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Perangkat Desa	Rp 220.500.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 27.497.351
4	Penyediaan Operasional Pemerintrah Desa	Rp 48.661.449
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.600.000
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp 600.000
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 24.960.000
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp 29.639.000
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 28.000.000
10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Rp 300.000
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 2.700.000
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pre-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Rp 3.000.000
13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)	Rp 5.000.000
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 1.000.000
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 2.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 sebesar Rp.464.356.351,-. Perubahan jumlah belanja dikarenakan kegiatan Musyawarah Desa hanya dilaksanakan satu kali karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak boleh mengumpulkan masa dan berkerumun. Sehingga realisasi kegiatan berkurang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Kepala Desa	Rp 54.000.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Perangkat Desa	Rp 220.500.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 27.497.351
4	Penyediaan Operasional Pemerintrah Desa	Rp 48.660.000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18.600.000
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp 600.000
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 24.960.000
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp 29.639.000

9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp	28.000.000
10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Rp	300.000
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp	2.700.000
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pre-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Rp	900.000
13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)	Rp	5.000.000
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp	1.000.000
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp	2.000.000

BAB III

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020 sejumlah Rp.551.032.300,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 19.200.000
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp 4.400.000
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp 65.380.000
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp 4.000.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Rp 23.650.000
6	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 21.080.000
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp 1.848.000
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 42.880.300
9	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp 7.740.000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 4.500.000
11	Penyelenggaraan Posbindu	Rp 6.620.000
12	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB	Rp 7.050.000
13	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Rp 3.600.000
14	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	Rp 11.535.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp 100.000.000
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 61.549.000
17	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Rp 100.000.000
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Rp 39.000.000
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Rp 21.000.000
20	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp 2.000.000
21	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp 4.000.000

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Realisasi kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.538.406.000,-. Perubahan jumlah belanja dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa seperti PAUD, Posyandu, BKB, dll ditiadakan untuk waktu beberapa bulan. Adapun rincian realisasi kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp	19.000.000
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp	2.100.000
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Eedukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp	65.380.000
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp	4.000.000
5	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Rp	23.650.000
6	Penyelenggaraan Posyandu	Rp	18.360.000
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp	924.000
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp	42.878.000
9	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp	4.960.000
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp	4.500.000
11	Penyelenggaraan Posbindu	Rp	6.620.000
12	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB	Rp	7.050.000
13	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Rp	900.000
14	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	Rp	11.535.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp	100.000.000
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp	61.549.000
17	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Rp	100.000.000
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Rp	39.000.000
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Rp	21.000.000
20	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp	1.000.000
21	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp	4.000.000

BAB IV

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2020 bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.69.190.000,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Rp 7.000.000
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 6.500.000
3	Pelatihan Kesisapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp 5.000.000
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Rp 15.000.000
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Rp 6.000.000
6	Pembinaan PKK	Rp 24.690.000
7	Fasilitasi KPMD	Rp 5.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2020 sejumlah Rp.60.670.000,-. Hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 Kegiatan pertemuan rutin PKK ditiadakan. Sehingga rincian realisasinya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Rp 7.000.000
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 6.500.000
3	Pelatihan Kesisapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp 5.000.000
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Rp 12.000.000
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Rp 6.000.000
6	Pembinaan PKK	Rp 19.170.000
7	Fasilitasi KPMD	Rp 5.000.000

BAB V

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2020 bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.71.941.580,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 54.941.580
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Rp 17.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Adapun realisasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 sejumlah Rp.71.940.000,-. Perubahan jumlah belanja hanya Rp.1.580,- dikarenakan kesulitan dalam merealisasikan nominal tersebut. Sehingga realisasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 54.940.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Rp 17.000.000

BAB VI

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2020 bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp.271.230.770,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penanggulangan Bencana	Rp 5.635.570
2	Keadaan Darurat	Rp 995.200
3	Keadaan Mendesak	Rp 264.600.000

B. REALISASI KEGIATAN

Adapun realisasi kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sejumlah Rp.269.130.000,-. Perubahan jumlah belanja dikarenakan kegiatan Penanggulangan Bencana tidak direalisasikan seluruhnya. Sehingga realisasi kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penanggulangan Bencana	Rp 3.535.000
2	Keadaan Darurat	Rp 995.000
3	Keadaan Mendesak	Rp 264.600.000

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa Wonosari berpedoman pada peraturan yang berlaku dan menjabarkan dalam bentuk Peraturan Desa dan penjabarannya, adapun peraturan-peraturan yang telah dibuat antara lain :

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 (hasil Mitra Desa).

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2020 antara lain :

- Pelayanan publik yang semakin maju karena dibarengi dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
- Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat.
- Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.
- Pelayanan pemerintahan yang ramah dan dinamis

b. Permasalahan

- Pandemi Covid-19 yang merubah waktu dan tempat kerja Pemerintah Desa.
- Jenis pelayanan publik yang semakin kompleks.
- Pegetahuan yang kurang memadai tentang aturan Pemerintah tentang administrasi kependudukan.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi desa yang bisa menjaddi sumber PADesa.
- Pelayanan informasi Desa yang tidak di imbangi dengan pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang masih kurang modern.

c. Upaya yang ditempuh

- Mengoptimalkan target dan hasil pekerjaan walaupun dengan sistem kerja dari rumah.
- Sistem kerja yang selalu berpedoman pada Perbup dan arahan dari Kecamatan atau Instansi terkait lainnya.
- Mencari informasi terupdate tentang administrasi kependudukan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pendapatan desa yang belum tersentuh bagi pendapatan asli desa dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
- Mengoptimalkan setiap lini Pemerintahan agar dapat bekerja sesuai dengan tugas, hak, dan wewenangnya.
- Mengoptimalkan, efesiensi dan efektifitas sumber daya manusia yang ada;
- Memperbaiki administrasi pemerintahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Keberhasilan

- Penguatan sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan dengan melibatkan dan memberdayaan semua elemen masyarakat.
- Terbangunnya perilaku pembangunan dan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- Tersusunnya rencana pembangunan jangka menengah desa yang dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan.
- Tersedianya data base desa sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Permasalahan

- Ketidaktepatan dalam perencanaan prioritas pembangunan sehingga mengakibatkan pembangunan yang kurang tepat.
- Banyaknya pengangguran yang tidak mampu terakomodasi melalui kegiatan pembangunan.
- Rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap pengawasan pembangunan desa masih kurang.

c. Upaya yang ditempuh

- Perbaiki sistem sosialisasi agar lebih baik dan transparan
- Melalui musyawarah desa perlu evaluasi potensi peserta/kader ikut dalam menentukan kebijakan pembangunan, sehingga dimasa yang akan datang perumusan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dalam perencanaan pembangunan.
- Sistem perencanaan dimulai dari kelompok terkecil di dusun dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Keberhasilan

- Terciptanya situasi kamtibmas sehingga masyarakat merasa nyaman.
- Terciptanya rasa handarbeni di masyarakat terhadap kondisi lingkungan.
- Terbentuknya forum komunikasi pemuda di tingkat dusun dan desa.
- Terbentuknya forum warga di masing-masing dusun sebagai wadah rembug dusun.

b. Permasalahan

- Banyaknya permasalahan sosial dimasyarakat terutama kenakalan remaja akibat pengaruh globalisasi.
- Kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga penyelesaian masalah kadang kurang matang.

c. Upaya yang ditempuh

- Penyuluhan tentang kesehatan dan keluarga berencana melalui kegiatan posyandu.
- Pembinaan kepemudaan melalui kegiatan penyuluhan kamtibmas, narkoba dan reproduksi remaja yang sehat.
- Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.
- Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
- Penanggulangan dan penanganan terhadap gangguan kamtibmas.
- Deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Keberhasilan

- Sistem perencanaan pembangunan melibatkan perempuan.
- Terbentuknya kelompok petani dan pelatihan
- Pelatihan bagi ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- Terbentuknya Lembaga Keuangan di tingkat desa melalui UPK, Gapoktan

- Terbentuknya kelompok masyarakat/paguyuban dusun dengan mengaktifkan kegiatan kepemudaan

b. Permasalahan

- Pluralisme penduduk dengan keterpengaruhan perkotaan sehingga mulai menggeser paradigma lama masyarakat desa yang mayoritas petani.
- Rendahnya dan tidak adanya kepastian harga komoditi pertanian sehingga masyarakat beralih sebagai buruh di kota.
- Pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan hasil bumi secara turun temurun, tidak adanya kreasi menyebabkan harga jual rendah.
- Bantuan kredit lunak dan mudah belum menyentuh UMKM.
- Menurunnya kegiatan gotong royong di masyarakat.
- Tingkat Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum maksimal

c. Upaya yang ditempuh

- Mengadakan pelatihan kepada ibu tangga kerjasama dengan dinas instansi terkait.
- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa sosial di masyarakat.
- Membentuk kelompok dan pembinaan kepemudaan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan gotong royong.
- Memberdayakan kelompok UMKM untuk berbadan hukum dan berijin.
- Mendorong UMKM untuk melakukan kreatifitas guna meningkatkan harga jual produk.
- Memfasilitasi bantuan modal peralatan kerja pedagang kecil.

BAB IX

PENUTUP

Secara umum Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 tahun dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diharapkan dengan laporan ini terbentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bisa diterima oleh masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materiil sehingga Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonosari Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Kami menyadari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari semua elemen masyarakat guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat kami nantikan.

Harapan kami Laporan ini bisa memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Wonosari, 10 Januari 2020

Kepala Desa Wonosari

